

### EDITORIAL

## Penggerogotan oleh Wakil Rakyat

NAFSU para wakil rakyat menggerogoti keuangan negara tidak pernah surut. Berbagai cara digunakan untuk memanfaatkan setiap peluang bagi penggelembungan kantong.

Setelah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menaikkan gaji sendiri melalui berbagai akal-akalan nomenklatur, seperti dana aspirasi dan dana komunikasi, kini giliran anggota dewan daerah menuntut hal serupa. Mereka minta naik gaji.

Dalam rapat kerja anggota DPRD se-Indonesia di Bandung pekan lalu, mereka melambungkan tuntutan itu. Selain mendesak kenaikan gaji, anggota DPRD menuntut agar diperlakukan sebagai pejabat negara. Status seperti itu dinikmati oleh para wakil rakyat di pusat.

Undang-undang, memang, menempatkan anggota DPRD sebagai aparat pemerintah daerah. Gajinya pun ditetapkan berdasarkan gaji pejabat tinggi daerah. Dan, setiap daerah—berdasarkan tingkat kemakmuran masing-masing—menentukan besar kecilnya gaji anggota DPRD.

Bila berpatokan pada gaji kepala daerah termasuk tunjangan, rata-rata gaji anggota DPRD sebesar Rp6,4 juta per bulan di kabupaten dan Rp8,7 juta per bulan di tingkat provinsi. Ini angka yang tinggi. Coba bandingkan dengan pendapatan rakyat miskin, yang menurut indikator Bank Dunia di bawah US\$1 per hari. Atau coba bandingkan juga dengan upah minimum regional yang masih berkisar Rp1 juta per bulan dewasa ini. Berpatokan pada upah minimum regional, gaji anggota DPRD kabupaten adalah enam kali lipat, dan delapan kali lipat bagi mereka yang di provinsi.

Bila tuntutan naik gaji dan perubahan status dipenuhi, uang negara akan digerogeti oleh wakil rakyat secara tidak patut. Karena dengan menjadi pejabat negara, mereka akan menikmati fasilitas protokol, termasuk jaminan pensiun.

Bisa dibayangkan betapa tidak adilnya wakil rakyat yang cuma bekerja lima tahun memperoleh jaminan pensiun sama dengan pegawai negeri yang rata-rata bekerja 30 tahun. Karena itu, hak pensiun yang selama ini diberikan kepada anggota DPR patut dibatalkan.

Desakan naik gaji anggota DPRD adalah refleksi mentalitas dan orientasi para wakil rakyat yang tidak kunjung membaik. Yaitu, mereka melihat lembaga DPR/DPRD sebagai lembaga cari makan. Bukan lembaga pengabdian. Negara dianggap sebagai sapi perah yang harus disedot susunya sampai kering, bahkan kalau perlu sampai membunuh sang betina.

Anggota dewan, di pusat maupun daerah, telah kehilangan roh sebagai wakil rakyat. Tidak ada lagi *chemistry* batiniah antara rakyat yang diwakili dan para wakil itu.

Negara harus merumuskan kapan gaji anggota DPR/DPRD patut naik. Salah satu *benchmark* adalah angka kemiskinan dan upah minimum regional.

Selama penduduk miskin di Indonesia belum turun drastis—katakan di bawah 20%—tidak ada alasan menaikkan gaji wakil rakyat. Jangan memberi peluang bagi suburnya naluri penggerogotan uang negara di kalangan wakil rakyat di pusat maupun daerah.

## KIM CLIJSTERS MASIH BERTAHAN

Meski harus memeras keringat, nasib Clijsters setidaknya jauh lebih baik ketimbang Zvonareva yang dipaksa angkat koper.

Olahraga, Hlm 26



REUTERS/DANNY MOLOSHOK

## PEMBANGUNAN JALAN LAYANG DIGUGAT

Pembangunan jalan yang bertujuan mengurangi kemacetan itu digugat karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum.

Megapolitan, Hlm 6



Pemasangan Iklan & Customer Service  
No Bebas Pulsa: 08001930990  
e-mail: cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)  
Rp67.000/bulan (di luar P. Jawa + ongkos kirim)



REUTERS



REUTERS/YURIKO HAKAO

**ANCAMAN RADIASI NUKLIR:** Kombinasi foto meledaknya reaktor nuklir di Fukushima Daiichi, Jepang, kemarin. Sementara itu, seorang ibu berkomunikasi dari balik kaca dengan anaknya yang diisolasi karena dicurigai terpapar zat radioaktif.

## Reaktor Nuklir di Jepang Meledak Lagi

LEDAKAN kembali mengguncang kompleks pembangkit listrik tenaga nuklir di Prefektur Fukushima, Jepang, kemarin. Asap hitam tebal membubung ke angkasa dan memicu kekhawatiran adanya kebocoran zat radioaktif berbahaya.

Perusahaan Tokyo Electric Power Co (Tepco) selaku operator menyatakan ledakan di unit reaktor nomor 3 diduga disebabkan oleh penumpukan hidrogen di dalam reaktor. Enam orang terluka dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 11.01 waktu setempat itu. Tepco mengatakan kandungan zat radioaktif di udara masih berada dalam batas aman, yakni 10,65 *microsieverts*, jauh di bawah 500 *microsieverts*, ambang batas yang ditetapkan pemerintah Jepang.

Beberapa jam setelah ledakan tersebut, Tepco menyatakan gagal mendinginkan reaktor nomor 2. Tiga hari sebelumnya, ledakan terjadi di unit nomor 1 dan mengakibatkan empat orang terluka. Jepang menyebut 22 orang positif terkontaminasi zat radioaktif dan 190 lainnya diduga terpapar zat tersebut

sebelum ledakan kedua terjadi.

Di Indonesia, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Asnatio Lasman mengatakan ancaman radiasi nuklir Jepang tidak akan sampai ke Indonesia. "Berdasar pengamatan, arah angin bertiup ke utara. Pemerintah Jepang juga menangani semuanya dengan baik. Penduduk Indonesia diharap tenang karena radiasi nuklir di Jepang tidak akan membahayakan Indonesia," ujar Lasman seperti dikutip *Metro TV*, kemarin.

Di samping ancaman radiasi nuklir, Jepang juga menghadapi krisis kemanusiaan karena jutaan orang hidup tanpa listrik dan air bersih. Kantor berita *Kyodo* melaporkan, 2.000 mayat ditemukan di dua kota pesisir. Analisis memperkirakan kerugian di wilayah yang langsung dihantam gempa telah mencapai lebih dari US\$170 miliar. Kondisi itu dikhawatirkan bisa membuat Jepang kembali terpuruk dalam resesi ekonomi. (Mps/AP/Reuters/I-1)

Berita terkait hlm 12

## TNI Terlibat Operasi Sajadah Ahmadiyah

Kodam III/Siliwangi mengaku terlibat dalam operasi, tetapi dilakukan dengan cara damai.

NURUL HIDAYAH

SETELAH mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Musyawarah Pimpinan Daerah Jawa Barat tancap gas dengan menggelar Operasi Sajadah.

Operasi yang bertujuan menyadarkan pengikut Ahmadiyah kembali ke ajaran Islam itu melibatkan TNI. Namun, operasi tersebut diduga dilakukan secara represif. Fakta itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI (F-PDIP) Eva Sundari di Jakarta, kemarin.

Eva mengaku sudah melaporkan operasi tersebut ke Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. "Menko Polkam mengatakan itu tindakan pengamanan," ungkapnya.

Akan tetapi, menurut Eva, TNI tidak sekadar melakukan pengamanan. Aparat TNI membantu pencabutan hak asasi manusia pengikut Ahmadiyah. "Di Sadarsari, Majalengka, dan Sukabumi, koramil meminta data keluarga dan memaksa untuk menghadiri penyuluhan dan ikrar pertobatan," tuturnya.

Pernyataan senada disampaikan Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara. Tim menemukan sekitar 56 kasus intimidasi TNI terhadap anggota Ahmadiyah di Jawa Barat dan Lampung.

Modusnya, kata tim, sangat sistematis, yakni pemaksaan menandatangani

ngani surat keluar dari Ahmadiyah diikuti oleh pengikraran untuk keluar dari Ahmadiyah.

TNI juga aktif meminta data jemaah Ahmadiyah tentang anggota, struktur kepengurusan, dan ajaran. Selain itu, TNI bersama kepolisian dan aparat negara juga memaksa untuk menguasai masjid dengan menjadi imam salat Jumat. "Anggota TNI mendatangi rumah warga dengan berpakaian seragam lengkap," tutur anggota tim advokasi Choirul Anam.

Tim menilai tindakan TNI tersebut melanggar ketentuan UU No 34/2004 tentang TNI.

### Tidak memaksa

Dalam menanggapi tuduhan itu, Kodam III/Siliwangi (Jawa Barat dan Banten) menyangkal. "Anggota Kodam Siliwangi sampai tingkat Babinsa tidak diizinkan memaksa seseorang keluar dari keyakinannya. Yang boleh dilakukan adalah membantu pemda dan kepolisian dalam menjaga ketertiban sesuai Pergub Jabar Nomor 12 Tahun 2011," ujar Kapendam III/Siliwangi Letkol (Inf) Isa Haryanto.

Ia menjelaskan, meski Operasi Sajadah bertujuan menyadarkan jemaat Ahmadiyah, cara-cara yang dipakai tidak boleh berbau kekerasan. "Kalau mereka (jemaat Ahmadiyah) tidak bersedia bertobat, ya sudah," pungkasnya. Bantahan serupa disampaikan Kapuspen TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul.

Secara terpisah, Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan peraturan daerah tentang Ahmadiyah di sejumlah daerah sudah sesuai dengan SKB tiga menteri.

Pemerintah akan menggelar dialog dengan berbagai pihak soal Ahmadiyah pada 22 Maret mendatang. "Rekomendasi akan dikeluarkan setelah dialog," terang Menag.(AX/AO\*/X-6)

nurul@mediaindonesia.com  
Berita terkait hlm 9



MUM IRFAN

**Eva Sundari**  
Anggota Komisi III DPR RI

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail: [interupsi@mediaindonesia.com](mailto:interupsi@mediaindonesia.com) atau [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com)



### Tugas dan Fungsi TNI

#### Pasal 7

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin 9 membantu tugas pemerintahan di daerah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Sumber: UUI No 34/2004/GRAFIS: TIVOK

Ayo Nabung di... Kantor Pos  
Dapatkan berbagai keuntungan & kemudahannya  
Tabungan BTN @ BATARAPOS  
• Biaya Administrasi • Online di Seluruh Indonesia  
• Kartu ATM • Setoran Awal Ringan  
• Asuransi Jiwa  
"Syarat dan ketentuan berlaku"  
Segera hubungi Kantor Pos terdekat Bank BTN  
Contact Center : 021 - 265 33555 www.btn.co.id

## PAUSE

### TV dan Kesehatan

MENONTON televisi cenderung berdampak negatif bagi kesehatan. Hasil penelitian itu diperoleh melalui uji coba 40 partisipan berusia 20-40 tahun. Mereka menonton televisi 30 menit setiap hari selama satu minggu. Beberapa fasilitas dan produk disediakan di sekitar mereka. Sebanyak 54% partisipan memilih makanan dan minuman saat menonton.

"Saat seseorang sadar penuh, ia tidak akan melakukan kegiatan buruk. Namun, kesadaran itu bisa terbagi ketika sedang melakukan kegiatan lain," jelas ketua penelitian Peter DeScioli dari Universitas Kedokteran Brandeis di Boston, AS. (Healthday/\*X-5)

## Presiden Ingin Cari Keadilan soal WikiLeaks

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menanggapi langsung pemberitaan dua koran Australia, *The Age* dan *The Sydney Morning Herald*, yang menuding dirinya menyalahgunakan kekuasaan.

Tanggapan itu disampaikan Presiden saat membuka rapat kabinet terbatas yang membahas pengendalian inflasi, ketahanan pangan, dan ketahanan energi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, kemarin.

Menurut Presiden, dirinya tidak mau terlalu reaktif dengan munculnya pemberitaan di

dua koran tersebut pada edisi 11 Maret 2011. Pemberitaan itu bersumber dari dokumen surat kawat Kedubes AS di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks.

Namun, lanjut Presiden, ia tidak akan tinggal diam di tuding terlibat korupsi dan menyalahgunakan wewenang. Ia berjanji akan menggunakan haknya untuk mendapatkan keadilan dengan cara-cara yang demokratis.

"Ya, tentunya nanti akan tahu siapa yang sesungguhnya demokratis, dan siapa yang tidak. Siapa yang main lapor,

"Kami mendesak agar penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang itu dilakukan segera."

**Haris Rusli**  
Aktivis Petisi 28

main tuduh, main hakim di dalam media massa, di dalam diplomasi, yang sungguh merugikan nama baik seseorang, yang boleh disebut sebagai

*character assassination*."

Presiden tidak menjelaskan cara apa yang hendak ditempuhnya untuk mendapatkan keadilan. Ia hanya menandakan bahwa dirinya adalah pemimpin bangsa yang berintegritas dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. "Percayalah, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Saya, insya Allah, akan tetap menjaga integritas karena itulah tugas saya sebagai pemimpin di negeri ini," tukasnya.

Boleh saja Presiden meminta

agar polemik tentang pemberitaan dirinya di dua koran Australia itu dihentikan. Akan tetapi, Petisi 28 tetap mengadukan penyalahgunaan kekuasaan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam intervensi kasus hukum oleh Presiden, yakni terhadap Kejaksaan Agung. Kami mendesak agar penyelidikan terhadap penyalahgunaan wewenang itu dilakukan segera," kata Haris Rusli, aktivis Petisi 28, seusai menemui KPK. (Nav/ED/X-3)